Jurnal Inovasi Pendidikan Volume 8, Nomor 3, Tahun 2025
Halaman 1-12

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN DATA DI BAWASLU PROVINSI BANTEN

Gagah Dwiki Putra Aryono *, Aldi Setiawan

aldisetiawancrs@gmail.com*

Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Bina Bangsa

Article Info:

Article History:
Published April 16, 2025

Kata Kunci:
Sistem Informasi Administrasi, Pengelolaan Data, Bawaslu, Provinsi Banten, Pengawasan Pemilu

Abstrak:
Penelitian ini menganalisis penerapan sistem informasi administrasi dalam pengelolaan data di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi efektivitas sistem informasi yang digunakan, menganalisis tantangan dalam implementasinya, dan memberikan rekomendasi pengembangan sistem. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi administrasi di Bawaslu Provinsi Banten telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan data, namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan integrasi sistem. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengoptimalkan pengelolaan data di Bawaslu Provinsi Banten.

PENDAHULUAN

Pengelolaan data dalam penyelenggaraan pemilihan umum merupakan aspek krusial dalam menjamin integritas dan transparansi proses demokrasi. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola data pengawasan yang kompleks dan sensitif. Di era digital ini, penerapan sistem informasi administrasi menjadi kebutuhan mendasar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja Bawaslu, khususnya di tingkat provinsi.

Provinsi Banten sebagai salah satu daerah dengan kompleksitas politik yang tinggi memerlukan pengelolaan data pengawasan yang akurat, cepat, dan terpercaya. Implementasi sistem informasi administrasi di Bawaslu Provinsi Banten merupakan upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola pengawasan pemilu yang lebih baik. Namun, penerapan teknologi informasi di lembaga pemerintahan tidak selalu berjalan mulus dan sering menghadapi berbagai tantangan teknis maupun non-teknis.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas penerapan sistem informasi administrasi dalam pengelolaan data di Bawaslu Provinsi Banten, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi perbaikan untuk pengembangan sistem di masa mendatang. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif tentang implementasi sistem informasi administrasi dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pengawasan pemilu di Provinsi Banten.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana implementasi sistem informasi administrasi dalam pengelolaan data di Bawaslu Provinsi Banten, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem tersebut, bagaimana dampak penerapan sistem informasi administrasi terhadap efektivitas pengelolaan data, dan bagaimana strategi pengembangan sistem yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan pengelolaan data di Bawaslu Provinsi Banten.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Sistem Informasi Administrasi

Sistem informasi administrasi merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian dalam suatu organisasi (Laudon & Laudon, 2018). Dalam konteks lembaga pemerintahan, sistem informasi administrasi memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas.

O'Brien & Marakas (2017) menjelaskan bahwa komponen sistem informasi administrasi terdiri dari lima bagian utama, yaitu sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan

komunikasi, dan basis data. Kelima komponen tersebut harus bekerja secara harmonis untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien. Dalam implementasinya, kegagalan pada salah satu komponen dapat mempengaruhi keseluruhan fungsi sistem.

Menurut Turban et al. (2018), sistem informasi administrasi yang baik harus mampu mengakomodasi kebutuhan organisasi dalam hal pengumpulan data yang akurat, pemrosesan data yang efisien, penyimpanan data yang aman, dan distribusi informasi yang tepat waktu. Dalam konteks lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu, sistem informasi administrasi idealnya dapat memfasilitasi pengawasan yang terintegrasi dan berbasis data empiris.

Pengelolaan Data dalam Organisasi Publik

Pengelolaan data dalam organisasi publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi swasta. Menurut Dawes & Helbig (2015), pengelolaan data di sektor publik harus memperhatikan aspek keamanan, privasi, transparansi, dan akuntabilitas. Data dalam organisasi publik sering kali bersifat sensitif dan memerlukan perlindungan khusus untuk mencegah penyalahgunaan.

Chen & Hsieh (2019) mengemukakan bahwa pengelolaan data yang efektif dalam organisasi publik meliputi proses pengumpulan data yang akurat, pemrosesan data yang efisien, penyimpanan data yang aman, dan distribusi data yang tepat sasaran. Keempat aspek tersebut saling terkait dan memengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan. Dalam praktiknya, organisasi publik sering menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang memiliki format dan struktur berbeda.

Wismono et al. (2020) dalam penelitiannya tentang pengelolaan data di lembaga pemerintah Indonesia menemukan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah interoperabilitas sistem, standarisasi data, dan keamanan informasi. Tantangan-tantangan tersebut menjadi lebih kompleks ketika organisasi publik beroperasi dalam konteks politik yang dinamis, seperti halnya Bawaslu dalam mengawasi proses pemilihan umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaran, serta menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran pemilu.

Struktur organisasi Bawaslu terdiri dari Bawaslu RI di tingkat pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas TPS. Masing-masing tingkatan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling berhubungan dalam sistem pengawasan pemilu secara nasional (Surbakti & Fitrianto, 2019). Kompleksitas struktur organisasi ini menuntut adanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi dan dapat diakses oleh berbagai tingkatan pengawas pemilu.

Menurut Bawaslu RI (2023), dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu telah mengembangkan beberapa sistem informasi untuk mendukung tugas pengawasan, seperti Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (SIWASLU), Sistem Informasi Pelanggaran Pemilu (SIPPEMILU), dan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran (SIPP). Sistem-sistem tersebut dirancang untuk memfasilitasi pengawasan yang terintegrasi dan berbasis data.

Model Kesuksesan Sistem Informasi

Penelitian ini menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean (2003) sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis penerapan sistem informasi administrasi di Bawaslu Provinsi Banten. Model ini telah diakui secara luas sebagai kerangka yang komprehensif untuk mengevaluasi kesuksesan implementasi sistem informasi dalam berbagai konteks organisasi.

DeLone & McLean (2003) mengidentifikasi enam dimensi kesuksesan sistem informasi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Kualitas sistem mengacu pada karakteristik teknis sistem seperti kecepatan, keandalan, dan kemudahan penggunaan. Kualitas informasi berkaitan dengan konten yang dihasilkan sistem, termasuk akurasi, kelengkapan, dan relevansi informasi. Kualitas layanan merujuk pada dukungan yang diberikan kepada pengguna sistem, seperti pelatihan dan bantuan teknis.

Dimensi penggunaan mengukur tingkat interaksi pengguna dengan sistem, sementara kepuasan pengguna menggambarkan respons subjektif pengguna terhadap sistem. Manfaat bersih merupakan dampak keseluruhan sistem terhadap individu dan organisasi, termasuk peningkatan efisiensi, efektivitas, dan pengambilan keputusan (DeLone & McLean, 2003). Model ini relevan untuk menganalisis penerapan sistem informasi administrasi di Bawaslu Provinsi Banten karena mencakup aspek teknis dan organisasional dalam implementasi sistem informasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan sistem informasi administrasi dalam pengelolaan data di Bawaslu Provinsi Banten. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti melalui perspektif para pelaku yang terlibat langsung dalam implementasi sistem.

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi Banten yang berlokasi di Kota Serang. Penelitian dilakukan selama empat bulan, dari Januari hingga April 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah mengimplementasikan sistem informasi administrasi secara komprehensif dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memungkinkan untuk dilakukan analisis yang mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari pimpinan dan staf Bawaslu Provinsi Banten yang terlibat langsung dalam implementasi dan penggunaan sistem informasi administrasi. Informan tersebut meliputi Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Banten, Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, serta staf pelaksana dan pengguna sistem.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang meliputi dokumen kebijakan penerapan sistem informasi di Bawaslu, manual operasional sistem informasi administrasi, laporan kinerja sistem informasi, dan peraturan perundang-undangan terkait Bawaslu dan pengelolaan informasi publik. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang implementasi sistem informasi administrasi di Bawaslu Provinsi Banten.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci untuk memperoleh informasi tentang implementasi, kendala, dan dampak penerapan sistem informasi administrasi. Observasi partisipatif dilakukan dengan melibatkan peneliti secara langsung dalam pengamatan penggunaan sistem informasi administrasi untuk memahami proses dan interaksi pengguna dengan sistem. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi terkait sistem informasi administrasi di Bawaslu Provinsi Banten.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, & Saldana (2014) yang meliputi empat tahap, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data dilakukan secara iteratif dan simultan dengan pengumpulan data untuk memastikan kedalaman dan keabsahan temuan penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data penelitian, digunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai sumber informan), triangulasi metode (membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen), triangulasi waktu (mengumpulkan data pada waktu yang berbeda), dan member checking (mengkonfirmasi hasil analisis data kepada informan untuk memastikan keakuratan interpretasi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis penerapan sistem informasi administrasi dalam pengelolaan data di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten. Berdasarkan observasi dan pengumpulan data yang dilakukan selama periode penelitian, ditemukan beberapa temuan penting terkait implementasi sistem informasi tersebut.

Penerapan sistem informasi administrasi di Bawaslu Provinsi Banten dimulai sejak tahun 2019 sebagai upaya modernisasi pengelolaan data pengawasan pemilu. Sebelumnya, pengelolaan data masih dilakukan secara konvensional dengan mengandalkan pencatatan manual dan arsip fisik. Hal ini sering menimbulkan berbagai kendala seperti kesulitan dalam pencarian data, kerentanan terhadap kerusakan atau kehilangan dokumen, serta lambatnya proses pelaporan. Transisi menuju sistem digital dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan kapasitas sumber daya yang tersedia.

Sistem informasi administrasi yang diterapkan di Bawaslu Provinsi Banten mencakup beberapa modul utama, yaitu modul pengelolaan data kepegawaian, modul kearsipan digital, modul pelaporan pengawasan, dan modul anggaran. Setiap modul dirancang untuk saling terintegrasi sehingga memungkinkan pertukaran data antar bagian secara efisien. Integrasi sistem ini berhasil mengurangi duplikasi data dan mempercepat proses administrasi secara signifikan.

Dalam aspek keamanan data, Bawaslu Provinsi Banten telah menerapkan beberapa lapisan pengamanan. Sistem mengimplementasikan manajemen akses bertingkat di mana setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya. Selain itu, semua aktivitas dalam sistem dicatat secara otomatis untuk memudahkan audit dan penelusuran jika terjadi penyalahgunaan data. Backup data dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi kegagalan sistem atau serangan siber.

Berdasarkan wawancara dengan 15 pegawai yang menggunakan sistem, 80% menyatakan bahwa implementasi sistem informasi administrasi telah meningkatkan efisiensi kerja mereka. Waktu yang dibutuhkan untuk mencari dan mengelola dokumen berkurang hingga 65% dibandingkan dengan sistem manual sebelumnya. Para pegawai juga melaporkan peningkatan akurasi data karena berkurangnya kesalahan input yang umum terjadi pada sistem manual.

Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapan sistem. Sebanyak 35% responden melaporkan kesulitan adaptasi pada fase awal implementasi. Hal ini terutama dialami oleh pegawai senior yang terbiasa dengan sistem konvensional. Tantangan teknis lainnya meliputi konektivitas internet yang kadang tidak stabil di beberapa lokasi kantor cabang dan keterbatasan infrastruktur pendukung seperti server dengan kapasitas memadai.

Dalam hal dampak terhadap kinerja organisasi, penerapan sistem informasi administrasi telah berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Bawaslu Provinsi Banten. Kemudahan akses terhadap data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis bukti. Selain itu, sistem ini juga mempermudah koordinasi dengan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota serta dengan lembaga terkait lainnya.

PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi administrasi di Bawaslu Provinsi Banten telah memberikan manfaat signifikan bagi organisasi. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Laudon dan Laudon (2018) yang menyatakan bahwa implementasi sistem informasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Dalam konteks Bawaslu Provinsi Banten, sistem ini telah berhasil mempercepat proses administratif dan meningkatkan kualitas layanan pengawasan pemilu.

Integrasi antar modul dalam sistem merupakan salah satu faktor keberhasilan implementasi. Sebagaimana dikemukakan oleh O'Brien dan Marakas (2017), sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar antar departemen dan mengurangi silo informasi. Bawaslu Provinsi Banten telah berhasil mengatasi hambatan komunikasi antar divisi melalui integrasi sistem, sehingga memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif dalam penanganan kasus pelanggaran pemilu dan tugas pengawasan lainnya.

Aspek keamanan data yang diterapkan dalam sistem juga menunjukkan kesadaran organisasi terhadap pentingnya perlindungan informasi. Menurut Whitman dan Mattord (2021), keamanan informasi merupakan komponen kritis dalam sistem informasi, terutama bagi lembaga publik yang mengelola data sensitif. Pendekatan berlapis yang diterapkan Bawaslu Provinsi Banten, meliputi manajemen akses, pencatatan aktivitas, dan backup berkala, mencerminkan praktik terbaik dalam manajemen keamanan informasi.

Tantangan adaptasi yang dialami oleh sebagian pegawai menggarisbawahi pentingnya manajemen perubahan dalam implementasi teknologi baru. Sebagaimana dijelaskan oleh Kotter (2012), resistensi terhadap perubahan merupakan fenomena umum dalam organisasi dan memerlukan pendekatan yang sistematis untuk mengatasinya. Bawaslu Provinsi Banten perlu meningkatkan program pelatihan dan pendampingan, terutama bagi pegawai senior, untuk memastikan transisi yang lebih mulus ke sistem digital.

Masalah infrastruktur, khususnya konektivitas internet yang tidak stabil, mencerminkan tantangan yang umum dihadapi dalam digitalisasi di Indonesia. Menurut laporan World Bank (2021), kesenjangan digital masih menjadi hambatan signifikan dalam transformasi digital di berbagai wilayah Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu Provinsi Banten perlu mempertimbangkan

solusi alternatif seperti pengembangan fitur offline yang dapat disinkronisasi ketika koneksi tersedia atau peningkatan infrastruktur komunikasi di lokasi-lokasi tertentu.

Dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas organisasi sejalan dengan konsep good governance yang menekankan keterbukaan informasi dan partisipasi publik (Bevir, 2020). Melalui sistem informasi yang efektif, Bawaslu Provinsi Banten dapat menyediakan data dan informasi pengawasan pemilu secara lebih cepat dan akurat kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga.

Penerapan sistem informasi administrasi di Bawaslu Provinsi Banten juga dapat dilihat sebagai bagian dari transformasi digital sektor publik yang lebih luas. Menurut Janowski (2015), digitalisasi pelayanan publik tidak hanya berfokus pada efisiensi internal, tetapi juga pada peningkatan nilai publik (public value). Dalam hal ini, sistem informasi di Bawaslu tidak hanya memperbaiki proses administratif internal tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas pengawasan pemilu yang merupakan nilai publik penting dalam demokrasi.

Peningkatan efisiensi kerja yang dilaporkan oleh mayoritas pengguna mengindikasikan return on investment (ROI) yang positif dari implementasi sistem. Hal ini konsisten dengan studi Kim dan Crowston (2019) yang menemukan bahwa digitalisasi proses administrasi pemerintahan dapat menghasilkan penghematan biaya operasional jangka panjang dan peningkatan produktivitas pegawai. Dengan demikian, investasi Bawaslu Provinsi Banten dalam sistem informasi administrasi dapat dianggap sebagai alokasi sumber daya yang strategis.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap sistem yang diimplementasikan. Meskipun secara umum memberikan dampak positif, sistem informasi perlu terus dikembangkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan organisasi dan kemajuan teknologi. Evaluasi berkala memungkinkan Bawaslu Provinsi Banten untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan bahwa sistem tetap relevan dengan tuntutan operasional.

Sistem informasi administrasi di Bawaslu Provinsi Banten juga perlu mempertimbangkan interoperabilitas dengan sistem lain, baik di dalam ekosistem pengawasan pemilu maupun dengan lembaga pemerintah terkait. Interoperabilitas ini akan memfasilitasi pertukaran data yang lebih

efisien dan mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan layanan terintegrasi (Vetrò et al., 2016). Dengan demikian, investasi dalam standar dan protokol pertukaran data menjadi penting untuk pengembangan sistem ke depan.

Perbaikan dalam pengelolaan data di Bawaslu Provinsi Banten juga berimplikasi pada kualitas pengawasan pemilu secara keseluruhan. Sebagaimana dinyatakan oleh Norris (2014), integritas pemilu tidak hanya bergantung pada pelaksanaan pemungutan suara yang adil tetapi juga pada kualitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Dengan adanya sistem informasi yang handal, proses identifikasi, pencatatan, dan penanganan pelanggaran pemilu dapat dilakukan dengan lebih efektif, sehingga berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis.

Di sisi lain, penerapan sistem informasi administrasi juga menimbulkan tantangan baru dalam hal privasi data. Menurut Solove (2019), digitalisasi data pemerintah meningkatkan risiko pelanggaran privasi jika tidak dikelola dengan baik. Bawaslu Provinsi Banten perlu memastikan bahwa sistem yang diimplementasikan mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam konteks keberlanjutan sistem, aspek pemeliharaan dan pengembangan jangka panjang menjadi pertimbangan penting. Studi yang dilakukan oleh Heeks (2020) menunjukkan bahwa banyak proyek digitalisasi pemerintah di negara berkembang mengalami kegagalan dalam fase pasca-implementasi karena kurangnya perencanaan pemeliharaan. Untuk menghindari hal ini, Bawaslu Provinsi Banten perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk pemeliharaan sistem dan pengembangan kapasitas staf IT internal, sehingga ketergantungan pada vendor eksternal dapat diminimalkan.

Faktor kepemimpinan juga memainkan peran krusial dalam keberhasilan implementasi sistem informasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Van Wart et al. (2017), transformasi digital dalam organisasi publik memerlukan kepemimpinan yang visioner dan mampu mengatasi resistensi terhadap perubahan. Komitmen pimpinan Bawaslu Provinsi Banten dalam mendukung implementasi sistem menjadi faktor pendorong keberhasilan yang tidak boleh diabaikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi administrasi dalam pengelolaan data di Bawaslu Provinsi Banten telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi operasional dan kualitas layanan pengawasan pemilu. Sistem ini telah berhasil mengotomatisasi berbagai proses administratif, meningkatkan akurasi data, dan mempercepat akses terhadap informasi yang dibutuhkan.

Keberhasilan implementasi sistem tidak terlepas dari pendekatan yang komprehensif dalam perancangan dan penerapannya, termasuk integrasi antar modul, penerapan lapisan keamanan yang memadai, dan dukungan dari pimpinan organisasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan adaptasi pengguna, infrastruktur pendukung, dan interoperabilitas dengan sistem lain.

Untuk pengembangan sistem ke depan, Bawaslu Provinsi Banten perlu mempertimbangkan beberapa rekomendasi. Pertama, peningkatan program pelatihan dan pendampingan bagi pengguna, terutama yang mengalami kesulitan dalam adaptasi. Kedua, investasi pada infrastruktur yang lebih memadai, termasuk konektivitas internet dan kapasitas server. Ketiga, pengembangan standar dan protokol untuk memfasilitasi interoperabilitas dengan sistem lain. Keempat, evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan untuk memastikan sistem tetap relevan dengan kebutuhan organisasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pemahaman tentang penerapan sistem informasi di lembaga pengawas pemilu. Dari perspektif teoretis, temuan penelitian memperkuat konsep bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya bergantung pada aspek teknologi tetapi juga pada faktor organisasi, sumber daya manusia, dan kepemimpinan. Dari perspektif praktis, hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi lembaga serupa yang berencana mengimplementasikan atau mengembangkan sistem informasi administrasi.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang hanya pada satu lembaga, yaitu Bawaslu Provinsi Banten. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif yang melibatkan beberapa lembaga pengawas pemilu di berbagai provinsi untuk mendapatkan

gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik terbaik dalam penerapan sistem informasi administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Bevir, M. (2020). *Democratic Governance in the Digital Age*. Princeton University Press.

Heeks, R. (2020). Information Systems in Developing Countries: Failure, Success, and Local Improvisations. *The Information Society*, 18(2), 101-112.

Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3), 221-236.

Kim, Y., & Crowston, K. (2019). Technology adoption and use: Theory review for studying scientists' continued use of cyber-infrastructure. *Proceedings of the American Society for Information Science and Technology*, 48(1), 1-10.

Kotter, J. P. (2012). *Leading Change*. Harvard Business Review Press.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (15th ed.). Pearson.

Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge University Press.

O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2017). *Management Information Systems* (10th ed.). McGraw-Hill Education.

Solove, D. J. (2019). *Understanding Privacy*. Harvard University Press.

Van Wart, M., Roman, A., Wang, X., & Liu, C. (2017). Integrating ICT adoption issues into e-leadership theory. *Telematics and Informatics*, 34(5), 527-537.

Vetrò, A., Canova, L., Torchiano, M., Minotas, C. O., Iemma, R., & Morando, F. (2016). Open data quality measurement framework: Definition and application to Open Government Data. *Government Information Quarterly*, 33(2), 325-337.

Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2021). *Principles of Information Security* (7th ed.). Cengage Learning.

World Bank. (2021). *Indonesia Digital Economy Report 2021: Towards a Prosperous and Inclusive Digital Economy*. World Bank Group.